
**PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DALAM KERAJAAN ACEH
DARUSSALAM**

Marsus

UIN Raden Mas Said Surakarta

marsus20@gmail.com

Abstract

The cultural development of a kingdom has become a necessity of its existence. It can also be interpreted as an attempt by the kingdom to show its existence in the world political arena. The Kingdom of Aceh Darussalam experienced cultural development as an effort to introduce the culture of the archipelago and Islam. These two things make the culture of the kingdom of Aceh Darussalam have different cultures from the cultures of other kingdoms, such as religious, political and trade cultures. In addition to the form of culture, there are also cultural products in the form of physical and non-physical, namely infrastructure and intellectuality. What is interesting is that these cultures were born from acculturation between religious teachings, customs and intellect, so that the unification of Aceh Darussalam's culture can be used as the identity of a kingdom..

Keywords: *Development, Culture, Kingdom of Aceh Darussalam.*

Abstrak

Perkembangan kebudayaan sebuah kerajaan sudah menjadi sebuah keniscayaan keberadaannya. Hal itu juga dapat diartikan sebagai sebuah usaha kerajaan untuk menunjukkan eksistensinya di dalam percaturan politik dunia. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami perkembangan kebudayaan sebagai sebuah usaha mengenalkan kebudayaan Nusantara dan Islam. Dua hal ini menjadikan kebudayaan kerajaan Aceh Darussalam memiliki budaya-budaya yang berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan kerajaan lain, seperti halnya budaya keagamaan, politik dan perdagangan. Selain berupa budaya juga terdapat hasil kebudayaan yang berupa fisik dan non fisik yaitu, infrastruktur dan intelektualitas. Yang menarik adalah budaya-budaya tersebut terlahir dari akulturasi antara ajaran agama, adat istiadat dan intelektualitas, sehingga unifikasi kebudayaan Aceh Darussalam dapat dijadikan sebagai jati diri sebuah kerajaan.

Kata kunci: *Perkembangan, Kebudayaan, Kerajaan Aceh Darussalam.*

Pendahuluan

Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan yang tidak dapat dilepaskan sebagai satu kesatuan sejarah Indonesia. Pada abad ke-16 dan 17, kerajaan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan penting yang pernah ada di Indonesia (Lombard, 1991). Sejarawan dan pengkaji perkembangan dan kebudayaan Aceh Darussalam yaitu A. Hasjmy menyebutkan bahwa terdapat berbagai kerajaan yang mendahului Aceh Darussalam yaitu; Kerajaan Islam Perlak (840-1291), disusul Kerajaan Islam Samudera Pasai (1042-1427), Kerajaan Islam Beunua atau Kerajaan Islam Teumieng/Tamiang (1184-11398), Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Pidier/Pidie, Kerajaan Islam Jaya, Kerajaan Islam Darussalam (1205-1530) (Hasjmy, 1983). Kerajaan-kerajaan tersebut sudah berdiri sejak abad ke-13-14 M meskipun masih kalah pamornya dengan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Berdirinya kerajaan Aceh Darussalam tidak lepas dari berbagai rintangan yang dialami sebelum meraih kejayaan. Tanta ngan-tantangan tersebut datang silih berganti, baik dari kelompok Portugis yang pada waktu itu menguasai Malaka maupun dari internat pemimpin kerajaan itu sendiri akibat perebutan kursi kekuasaan.¹ Sepanjang perjalanannya, kerajaan Aceh Darussalam mulai mencapai puncak keemasan pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Usaha Sultan Iskandar untuk memajukan kerajaan dan mensejahterakan penduduknya dengan merebut selat Malaka sebagai jalur perdagangan yang dikuasai kelompok Portugis (Ahmad, 1972). Untuk memajukan kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar melalui perjuangan fisik dan non fisik yaitu; Perjuangan yang dilakukan melalui perjuangan fisik adalah memperkuat armada dan angkatan perang Kerajaan Aceh, melalui kekuatan tersebut Kerajaan Aceh dapat memperluas wilayah kekuasaan Aceh dengan menaklukkan Kerajaan Deli, Kerajaan Aru, Kerajaan Johor, Kerajaan Pahang dan Kerajaan Kedah. Disamping itu, Kerajaan Aceh dapat melakukan penyerangan terhadap bangsa Portugis di Malaka. Perjuangan non fisik dilakukan dengan meningkatkan perdagangan di Kerajaan Aceh, upaya ini dilakukan dengan menjalin kerjasama perdagangan dengan bangsa India, Kerajaan Inggris dan Kerajaan Prancis. Disamping itu, kerajaan Aceh juga menjalin kerjasama dengan kerajaan Mancanegara melalui perdagangan ekspor dan impor.

Ketika kerajaan Aceh berhasil mengusir kelompok Portugis dan menguasai kawasan-kawasan perdagangan yang strategis, Aceh lambat laun mulai tumbuh berkembang. Perkembangannya meliputi berbagai aspek, baik dalam bidang pemerintahan, religi, sosial-budaya dan perekonomian. Perkembangan selanjutnya, tokoh-tokoh pemikir mulai bermunculan dengan sejumlah karya-karya yang dihasilkan. Mereka menjalin hubungan timbal balik antara tokoh agama dengan kerajaan, salah satunya dalam urusan hukum keislaman.

Bergulirnya masa-masa kemajuan kerajaan Aceh juga dapat dilihat dari perkembangan budaya yang berkembang saat itu. Baik dalam bentuk fisik yang ditandai dengan pembangunan, maupun pemikiran tokoh dengan sejumlah hasil karya-karyanya. Oleh karena itulah, penting kiranya dibahas bagaimana perkembangan kerajaan Aceh, dan bentuk-bentuk kemajuan budaya yang ada pada suatu masa tertentu.

Kerajaan Aceh Darussalam Dalam Lintasan Sejarah

Membahas kerajaan Aceh tentu tidak bisa lepas dengan kerajaan-kerajaan yang sudah berdiri sebelumnya, salah satunya kerajaan Pedie (Pedir) yang sempat menguasai Aceh sebelum kerajaan ini berdiri. Sulayman b. Ahmad al-Mahri dalam bukunya yang berjudul *al-Minhaj al-Fakhir fi 'Ilm al-Bahr al-Zakir* ia menjelaskan, Pidier merupakan salah satu kota pelabuhan terpenting di kawasan pantai timur Pulau Sumatra, khususnya sebagai pelabuhan lada.⁴ Menjelang akhir abad ke 8 H/14 M, kerajaan yang mulanya bercorak Hindu Budha dibawah pimpinan Shahir Poli berubah menjadi Kerjaan Islam Pidier akibat ekspansi yang

¹ Dua rintangan tersebut, pertama, peran kerajaan Aceh Darussalam dalam mengusir penjajah sangatlah vital. Hal itu didasarkan pada kondisi geografis Aceh yang terletak pada jalur perdagangan, sehingga perlawanan demi perlawanan dari kerajaan Aceh sangat mengganggu aktivitas ekonomi Portugis. Dengan demikian blokade kegiatan perekonomian dilakukan oleh kerajaan Aceh Darussalam sebagai cara untuk mengusir pihak Portugis. Kedua, rintangan internal yaitu konflik perebutan kekuasaan.

dilakukan oleh Kerajaan Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah (755-811 H/1354-1408 M) dan mengalahkan balatentara pimpinan Syahir Poli dalam suatu peperangan yang dahsyat. Namun unsur-unsur kebudayaan agama terdahulu yaitu agama Hindu Budha baru terkikis setelah pengangkatan Sultan Mahmud II ‘Alaiddin Johan Syah yang mengkat pada tahun (811-870 H/1408-1465 M) (Hadi, 2010)

Kerajaan Aceh berhasil bebas dari kerajaan Pedie karena upaya Sultan Ali Mughayat Syah sekitar tahun 1520. Pada tahun itu juga kerajaan Aceh berhasil mengambil alih kuasa kerajaan Daya ke dalam kekuasaannya. Pada tahun 1524, disamping kerajaan Daya, kerajaan Pedie pun juga berhasil dimasukan ke dalam kekuasaan Aceh. Pada saat Sultan Ali Mughayat Syah dilantik menjadi Sultan Kerajaan Darussalam (Kerajaan Islam Aceh), dia berpendapat dalam mengusir Portugis dengan cara menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil ke dalam satu Kerajaan yang besar. Sehingga kerajaan-kerajaan kecil mempunyai angkatan darat serta laut yang disiplin (Said, 2007).

Pada tanggal 12 Zulqaidah tahun 916 H / 1511 M. kerajaan Aceh baru berdaulat bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Pada saat Portugis berhasil menduduki Malaka, saat itu pula kerajaan Aceh benar-benar terbebas dari belenggu kerajaan Pedie dan akhirnya menjadi kerajaan Aceh yang merdeka. Sebagai sosok yang berjasa dalam membebaskan Aceh dari kekangan kerajaan Pedie, Sultan Ali Mughiyat Syah akhirnya diangkat menjadi raja pertama dalam kerajaan Aceh (Mukarrom, 2014). Pada perkembangan selanjutnya kerajaan Aceh menjadi salah satu kerajaan sentral kekuasaan di wilayah Sumatera Utara. Bebasnya Aceh dari kerajaan Pedie, ternyata bukan berarti Aceh bebas dari segala serangan raja-raja lain. Orang-orang Portugis yang telah menduduki Malaka saat itu, terus berusaha mengganggu kerajaan Aceh. Pada tahun 1606 Portugis menyerang Aceh dan berhasil Imengepung Kotaraja. Meski serangan itu akhirnya berhasil dipatahkan oleh Perkasa Alam, putra angkat Sultan Alauddin Riayat Syah. Sehingga orang-orang Portugis tidak berhasil menguasai Aceh. Mereka diusir dan dirampas semua senjatanya.

Pada masa kekuasaan Sultan Ali Mughiyat (1514-1528), Aceh mulai maju dan berkembang. Perkembangan itu mencakup berbagai aspek, baik perekonomian, politik, maupun ekspansi (perluasan wilayah kekuasaan) (Harun. 1995). Di bidang ekonomi Aceh tidak bisa dilepaskan dengan dunia kemaritiman. Kawasan Aceh yang dikenal dengan jalur perdagangan terbesar menjadi salah satu modal dalam memperoleh pendapatan, di samping dari usaha-usaha masyarakat, lebih-lebih dari hasil pajak atau bea cukai para pedagang luar. Pasca meninggalnya Sultan Ali Mughiyat, kursi pemerintahannya dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Ri’ayat Syah. Dalam kepemimpinannya masih melanjutkan perjuangan pemimpin pertama. Ekspansi ke berbagai wilayah untuk memperluas kekuasaannya terus dilakukan. Pada masa ini Aceh terbilang mengalami kemajuan baik dalam ekonomi maupun dalam sistem keteraturan pemerintahan. Sepeninggal raja Alauddin Ri’ayat Syah, kekuasaannya diganti oleh putranya, Husen. Pergantian ini menimbulkan rasa cemburu dan iri hari dari saudaranya, sehingga menimbulkan perpecahan diantara mereka, dan perpecahan itu mengakibatkan pertempuran dan membuat Sultan Husain dan Sultan Aru meninggal. Kursi kedudukannya kemudian diganti oleh Sultan Pariaman (Djajadiningrat. 1982). Semenjak perpindahan kursi kekuasaan ini

kerajaan Aceh lambat laun mengalami kemunduran. Daerah-daerah yang pada mulanya menjadi daerah kekuasaannya, lepas karena lemahnya pengawasan yang dipengaruhi oleh penetrasi kelompok Portugis. Situasi ini kembali bangkit setelah sultan Iskandar Muda tampil menjadi pemimpin kerajaan Aceh.

Kerajaan Aceh dalam kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, tercatat sebagai fase kegemilangan. Pasca kemerosotan Aceh sebelumnya, ketika Iskandar Muda berkuasa berhasil memulihkan kondisi Aceh. Kawasan yang sempat lepas ke tangan penjajah, berhasil direbut Kembali. Kekuasaan Aceh yang paling menguntungkan dalam hal ekspansi wilayah menurut Beaulieu adalah masa Sultan Iskandar Muda. Ia mampu melebarkan kekuasaannya dari timur, barat bahkan di semenanjung Melayu. Di sebelah timur, ia mampu melakukan ekspansi ke Pedir, Pasai, Deli dan Aru. Di sebelah Barat, ia menguasai Daya, Labu, Singkel, Barus, Bataham, Pasaman, Padang, Tiku dan Priaman. Sedangkan negeri di semenanjung Melayu yang dikuasainya meliputi Johor, Kedah, Pahang dan Perak. Sultan Iskandar Muda mampu membentuk kerajaan Aceh Darussalam menjadi kerajaan yang paling kuat di Nusantara bagian barat. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dengan adanya kekuatan militer yang baik (Lombard, 1991).

Setelah kelompok Portugis berhasil diusir dari Aceh, tidak lama kemudian Sultan Ali Ra'yat Syah meninggal dunia. Pada tahun 1607 Perkasa Alam dengan gelar Sultan Iskandar Muda menggantikan posisi Ali Ra'yat. Saat itu Sultan Iskandar Muda benar-benar masih berumur 18 tahun. Kepemimpinan Sultan Iskandar Muda berhasil mengembalikan kejayaan Aceh. Iskandar Muda sebagai icon yang menandai kembalinya eksistensi Aceh dalam percaturan politik pemerintahan. Kesungguhan Sultan Iskandar Muda dalam memperkuat armada dan angkatan perang kerajaan Aceh hasilnya sangat membanggakan. Menurut Dorleans, Raja Aceh merupakan raja terkuat di bidang bahari dibanding negeri tetangga, dengan kurang lebih 100 kapal perang besar yang siap siaga di Aceh, Daya, dan Pidir. Sepertiga diantaranya lebih besar dari semua kapal yang dibangun di negeri-negeri Eropa. Biasanya 600 hingga 800 orang bisa muat dalam kapal yang paling besar. Saat itu Kerajaan Aceh telah mampu membuat kapal-kapal perang yang besar. Menurut Mohammad Said, mudah saja dijumpai tukang-tukang besi yang ahli, apalagi tukang-tukang yang membuat kapal, banyak sekali. Pertukangan adalah bakat orang Aceh, pertukangan besi, penghancur tembaga dan membikin kapal. (Dorleans, 2006).

Masa pemerintahan Iskandar Muda yang hampir 30 tahun berlangsung, ia berhasil mengembalikan arus perdagangan dan melakukan konsolidasi dari berbagai sektor ekonomi, politik, sosial budaya, dan kehidupan beragama. Di bidang politik ia berhasil menyatukan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kelompok, seperti Batak, Arab, Persia, Turki, dan sebagainya (Ahmad, 1972). Selain di bidang ekonomi, Sultan Iskandar Muda juga berhasil memajukan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Hal itu melalui mediasi perdagangan Muslim India dan para ulama-ulama, sehingga disamping adanya kegiatan perdagangan—terjadi pula dialektika studi-studi keislaman. Iskandar Muda sepertinya telah sadar, luasnya wilayah bawahan Aceh membawa serta banyak kebutuhan lain, salah satunya adalah memenuhi dakwah Islam yang sedianya menjadi tugas kerajaan. Cara ini juga sebagai pembuktian bahwa ibukota

kerajaan ikut memperhatikan tumbuh kembang daerah kekuasaannya. Sebagai raja yang dilahirkan di pergaulan istana yang berperadaban tinggi, Sultan Iskandar Muda menerapkan potensi sumber daya manusia terdidik guna membentuk negara Islam yang di dalamnya terjalin secara kuat antara pemerintah dengan rakyatnya. Salah satu langkah yang bisa diandalkan adalah memperkuat basis religius masyarakatnya (Gazali. 2016). Usaha Iskandar Muda untuk menjadikan Aceh kembali jaya benar-benar berhasil dan tercapai dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan, kala itu Aceh sebagai sentral ekonomi dan keislaman dari berbagai negara.

Kerangka Teori

Teori Evolusi Perkembangan Kebudayaan

Perkembangan budaya tidak lepas dengan kehidupan masyarakat. Tradisi kebudayaan ada karena adanya peran dari masyarakat. Keduanya merupakan dua sisi penting yang memiliki kesinambungan dan tidak bisa dipisahkan. Hubungan tersebut bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Interaksi ini merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas yang di dalamnya terdapat pola aturan tertentu (Koentjaraningrat, 1984). Oleh karena itu, suatu kebudayaan yang berkembang dapat bertahan apabila manusia memandang, bahwa hal tersebut masih dianggap penting dan memiliki manfaat bagi kehidupannya. Sebaliknya, budaya masyarakat akan terkubur dengan sendirinya apabila manusia memandang sudah tidak memiliki manfaat bagi kehidupannya.

Mengacu pada rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, bahasan penelitian ini memakai pendekatan budaya. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap bentuk-bentuk kebudayaan yang ada dan berkembang di kerajaan Aceh. Kebudayaan yang dimaksud di sini, bukan sekadar menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau, namun berupaya memahami adanya proses secara utuh pola interaksi manusia dengan potensi yang dimiliki oleh kehidupan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Dengan begitu, diperlukan ulasan perjalanan kerajaan Aceh dari awal berdiri dan berkembang selanjutnya.

Adapun teori yang digunakan berdasarkan uraian di atas, adalah teori evolusi yang dikemukakan oleh Lewis Henry Morgan. Teori ini dijadikan metode berfikir untuk mengkaji perkembangan budaya dalam kehidupan kerajaan Aceh, serta perkembangan budaya yang menyertainya. Bagi Morgan, setiap kehidupan yang dijalani oleh kelompok masyarakat pasti melalui tahapan-tahapan. Masyarakat tidak mencapai perkembangannya dengan cara begitu saja, baik perkembangan fisik maupun rohaniah. Perkembangan ini senantiasa melalui langkah-langkah yang evolutif dan berkesinambungan. Morgan dalam hal ini membagi tahapan perkembangan kebudayaan manusia menjadi delapan bagian:²

² Mengenai tahapan perkembangan kebudayaan dapat dilihat di dalam karya yang merupakan masterpiece di bidang antropologi budaya. Lewis Henry Morgan, *Ancient Society; Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization*, (New Delhi: Indian KP Bagchi, 1982). Bandingkan dengan bukunya Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: UI Pres, 1990), hal. 44-45. dan Dadang Suparlan, *Manusia Dalam Kontek Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 77.

1. Era liar tua (zaman awal), sejak adanya manusia sampai ia mengetahui macam-macam benda alam, seperti api. Saat ini hidup manusia dengan meramu, mencari akar-akar dan tumbuhan liar.
2. Era liar madya, sejak manusia menemukan api hingga menemukan senjata busur-panah. Zaman ini manusia mulai berubah bidang mata pencahariannya dari meramu menjadi pencari ikan di sungai- sungai (berburu).
3. Era liar muda, dimana manusia sejak menemukan senjata sampai memiliki kepandaian membuat barang-barang tembikar.
4. Era barbar tua, zaman ketika manusia pandai membuat tembikar sampai ia mulai beternak dan bercocok tanam.
5. Era barbar madya, zaman sejak manusia beternak dan bercocok tanam sampai menemukan kepandaian membuat peralatan dari logam.
6. Era barbar muda, atau zaman manusia sudah pandai membuat benda-benda dari logam sampai manusia mengenal tulisan.
7. Era peradaban purba (*civilization*), merupakan zaman yang ditandai dengan adanya penggunaan bahasa, tulisan, elektronik percetakan, dan industri lain seperti sekarang.
8. Era peradaban masa kini.

Sejak lahir dan menginjakkan kaki di muka bumi, pada dasarnya manusia belum mempunyai kemampuan untuk memahami dan mengetahui secara mendalam fenomena yang terjadi di alam semesta. Pengetahuan yang didapatkan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber kekayaan alam dengan melalui tahapan evolutif. Sehingga, sering perkembangannya, manusia dapat membangun peradaban dengan berbagai kemajuan, baik di bidang sosial-budaya, perekonomian, religi, dan lain sebagainya.

Morgan berpandangan, bahwa perubahan sosial sebagai suatu evolusi dari 'kebiadaban' (*savagery*, atau dikenal sebagai keadaan yang 'liar' dan 'alamiah') pada kehidupan yang 'berperadaban' (Morgan, 1984). Artinya, bahwa manusia yang pada awal mulanya memiliki suatu peradaban tidak teratur, kemudian berubah menjadi peradaban yang lebih baik dan terstruktur. Hal ini sebagai bentuk evolusi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Evolusi secara umum dipandang sebagai suatu perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi kenyataannya terkadang tidak selalu demikian. Sosiolog Jerman, Ferdinand Tonnies menguraikan nostalgia tentang peralihan dari masyarakat tradisional yang saling kenal (*gemeinschaft*) ke masyarakat modern yang tidak saling kenal (*gesellschaft*). *Gemeinschaft* dalam bahasa Inggris disebut communal society atau masyarakat komunal. Dalam bahasa Indonesia disebut paguyuban. *Gemeinschaft* adalah asosiasi sosial di mana individu-individu cenderung ke arah komunitas sosial daripada keinginan dan kebutuhan individu mereka (Burke, 2003). Dalam hal ini, melalui tahap evolusi masyarakat pada hakikatnya memang mengharap berubah ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, terjadinya evolusi dalam kehidupan manusia kadang kala terjadi secara bertolak belakang.

Pandangan teori evolusi di atas sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, dimana kerajaan Aceh dari awal masa berdirinya melampaui tahapan- tahapan perubahan, dari yang sebelumnya belum berbentuk sebuah kerajaan, kemudian berkembang membentuk peradaban

ke arah yang lebih maju. Perubahan itu bukan saja dalam bidang struktur pemerintahan, melainkan dalam bidang perekonomian, budaya, agama dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut saling menjalin dan berkesinambungan satu sama lain untuk menciptakan stabilitas sosial dalam kehidupan kerajaan tersebut. Meskipun pada sisi tertentu terciptanya stabilitas sosial tidak berjalan secara mulus karena adanya fenomena sosial yang bergerak secara beragama dengan tujuan yang berbeda-beda.

Pekembangan Kebudayaan Kerajaan Aceh Darussalam

1. Budaya Keagamaan

Gambaran nilai budaya Aceh memang sangat menarik. Budaya Aceh tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat substansial, tetapi juga menyangkut esensi dari nilai budaya itu sendiri. Di Aceh, nilai-nilai budaya setempat telah bercampur-baur dengan nilai-nilai budaya asing (utamanya budaya Islam yang masuk ke daerah ini) di antara keduanya tidak ada lagi jurang pemisah, melainkan telah menyatu seperti dua mata uang yang sama. Kedua nilai-nilai budaya dimaksudkan adalah nilai-nilai budaya Aceh dengan nilai-nilai budaya ajaran Islam. Pada abad 6 M, Islam sudah eksis di Aceh. Dari istana, perlahan Islam mulai dipeluk oleh masyarakat bawah luar istana. Dianutnya Islam sebagai keyakinan, di kemudian hari termanifestasi dalam pola-pola kehidupan yang rill salah satunya adalah kesadaran mendirikan institusi pemerintahan berbasiskan hukum Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan berdirinya beberapa kerajaan penting yang mewarnai perkembangan Islam di Aceh seperti Perlak, Lamuri dan Pasai (Hasjmy. 1981). Tidak dapat dinafikan bahwa sejak berabad lamanya hukum adat atau yang dikenal sebagai adat istiadat merupakan peraturan nilai-nilai dan keyakinan sosial budaya telah tumbuh dan berurat akar dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Sehubungan dengan itu, dalam masyarakat Aceh selanjutnya telah termaktub dalam suatu hadih maja "*Hukom ngon adat lagei zat ngon Sifeut*". Artinya, hukum agama Islam dan hukum adat tidak ubahnya seperti zat dengan sifat yang tak dapat dipisahkan. Aboe Bakar Aceh menulis bahwa pada awalnya adat dan budaya Aceh sangat kental dengan pengaruh Hindu (Aceh, 1971). Ia merujuk kepada beberapa buku sebelumnya yang ditulis oleh ahli ketimuran. Hal itu terjadi karena sebelum Islam masuk ke Aceh, kehidupan masyarakat Aceh sudah dipengaruhi oleh unsur Hindu. Setelah Islam masuk, tidak semua unsur-unsur Hindu yang bertentangan dengan Islam dapat dihilangkan sama sekali. Hal ini terjadi oleh karena unsur-unsur Hindu tersebut sudah sangat lama membudaya dan mengakar dalam kehidupan adat dan budaya masyarakat Aceh, bahkan sebelum Islam muncul di Aceh (Aceh, 1971). Pertautan antara budaya keagamaan yang terjadi di Aceh tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek- praktek keagamaan. Masyarakat Aceh memiliki budaya keagamaan yang sudah mengakulturasi dengan adat istiadat dan beberapa agama-agama sebelum Islam. Kasus demikian tidak hanya terjadi di kerajaan Aceh Darussalam. Realitas keragaman umat Islam Nusantara mengindikasikan bahwa di segala penjuru negeri kepulauan ini pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam sangat bervariasi yang terpengaruh oleh budaya pra Islam. Sebelum Islam datang, berbagai macam

adat kuno dan kepercayaan lokal banyak dipraktekkan sehingga sangat menyatu dengan struktural sosial. Sebagian besar tempat, kedatangan Islam dengan jalan damai bukan penaklukan dan secara umum dapat dikatakan bahwa Islam tidak menggantikan atau menghancurkan tradisi budaya yang sudah lama ada terutama Hindu dan Budha tetapi memadukan dengan tradisi yang sudah ada. (Erni, 2000).

Dengan demikian kondisi keagamaan di kerajaan Aceh Darussalam secara umum sudah mengalami akulturasi dengan budaya setempat, di antaranya seperti: *rah ulei*, atau mencuci muka di kuburan ulama dengan air yang dicampuri sejumlah bunga-bunga, jeruk purut dan bahan tertentu lainnya, kemudian dilanjutkan dengan Salat Hajat dua rakaat yang diyakini bisa menjadi perantara dalam menyampaikan sesuatu maksud untuk mencari berkat dalam mengharapkan semua keinginan mereka akan segera tercapai. Selain itu di Aceh Darussalam juga mengamalkan ajaran tawasul. Tawasul adalah suatu isu kontroversial di kalangan umat Islam yang bagi kalangan aliran *Sunni* amalannya dianggap berdasarkan pada akidah Islam yang berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Isunya adalah berdoa memohon sesuatu hajat dari Allah melalui mereka yang sudah meninggal dunia sebagaimana kepada Nabi kita Muhammad Saw. atau para wali-wali Allah yang salihin yang terdiri dari para ulama yang telah dikenal pasti melalui keilmuan dan kewarakan mereka (Aceh, 1971). Tawasul seringkali muncul secara fenomenal dalam suatu fenomena sosial, termasuk di kalangan umat Islam, dengan mendatangi kuburan yang dipandang mulia dan berhasil kepadanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti kekayaan, kedudukan, jodoh, dan lain-lain (Azra, 2018).

2. Dimensi Politik

Corak sistem politik kenegaraan dan kebangsaan yang dipraktekkan di kerajaan Aceh Darussalam adalah ‘kesultanan’, dimana ini merupakan sebuah formulasi antara nasionalisme dan keagamaan. Aceh Darussalam muncul dan berdiri sebagai bentuk Negara yang tidak menerapkan kekhalifan seperti yang ada di timur tengah seperti Baghdad. Pada saat itu juga Baghdad atau dinasti-dinasti yang menerapkan sistem kekhalifan sedang mengalami kemunduran, sehingga momentum tersebut digunakan untuk mendistribusikan sistem pemerintahan ke berbagai kekuatan kecil, yang dikenal dengan “kesultanan”. Istilah ini berasal dari kata “sultan”, yang dalam bahasa Arab bermakna “pemegang kekuasaan atau otoritas”. Pada awalnya gelar ‘sultan’ dan sistem ‘kesultanan’ diberikan dari kekhalifahan yang berpusat di Baghdad. Namun pada rentang sejarahnya, terutama pada abad ke-13 gelar tersebut dipakai oleh kesultanan Turki Ottoman dan beberapa wilayah menggunakan sistem tersebut tanpa harus meminta legitisasi dari Baghdad (Arnold, 1965).

Sistem pemerintahan kesultanan dengan gelar kepala Negara sultan menandakan bahwa Aceh Darussalam merupakan pemerintahan yang sah dan berdiri sendiri dan berlandaskan pada ajaran Islam, serta bertugas membumikan Islam sebagai asas kenegaraan (as-singkili, 1971). Karena itu, para penguasa Aceh diberi gelar yang sarat dengan nilai-nilai politis dan keagamaan. Sultan Iskandar Muda, umpamanya, diberikan gelar *Sayyidunâ wa Mawlanâ Paduka Seri Sultan Iskandar Muda Johan Berdaulat Zhill*

Allah fi al-‘Alâm. Demikian juga halnya dengan penggantinya Iskandar Thani. Ratu Shafiyat al-Dîn diberi gelar dengan *Sulhanah Taj al-‘Alam Shafiyat al-Dîn Berdaulat Zhill Allah fi al-‘Alam* (as-singkili, 1971).

Penguasa kerajaan Aceh Darussalam memiliki dua tugas yaitu politik dan agama. Dua konteks kepemimpinan tersebut menjadikan penguasa Aceh memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan kenegaraan dan keagamaan secara penuh. Namun, ini tidak berarti bahwa seorang penguasa Aceh juga berfungsi sebagai seorang ‘ulama’. Gelar dan predikat ‘ulama’ yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai ilmu keagamaan yang mendalam. Karena itu, otoritas keagamaan yang dimiliki oleh sultan dalam hal ini harus dipahami dari perspektif bahwa ia adalah penguasa tertinggi dari sebuah kerajaan Islam melalui mana ajaran Islam dapat dilaksanakan secara baik. Dengan kata lain, otoritas keagamaannya ini dapat disebut sebagai sebuah “otoritas yang mengandung makna keagamaan” (*religiously sanctioned authority*) (Hadi, 2004).

Secara filosofis religious dua peran atau tugas dari seorang sultan tersebut mengindikasikan bahwa merupakan sebuah lembaga yang sakral, sementara penguasanya secara pribadi tidak. Karena itu, dapat dicermati dalam perjalanan sejarahnya, Aceh pernah memiliki beberapa sultan yang tidak memenuhi persyaratan kemampuan manajerial dan moral yang memadai sehingga mereka harus diturunkan dan, bahkan terbunuh (Hadi, 2004). Adalah dilandasi oleh kepemilikan kedua otoritas ini juga, seorang penguasa di Aceh diberikan tanggung jawab yang besar dalam memimpin umatnya. Di antara tugas terpenting dari penguasa adalah mewujudkan sebuah kerajaan yang maju, makmur, adil, dan berkedaulatan. Hal ini ditambah lagi dengan tugas mengaplikasikan ajaran Islam di kerajaan dan menjaga keselamatan kerajaan, baik dari ancaman dalam maupun luar. Tugas dan tanggung jawab penguasa ini akhirnya menuntut adanya loyalitas dari pihak rakyat, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Singkili (Hadi, 2004).

Dengan model sistem pemerintahan kesultanan, maka seorang penguasa merupakan pusat sebuah keputusan (*centered of politic*). Karena itu, pendelegasian kekuasaan kepada para bawahannya merupakan sebuah keniscayaan. Ia adalah seorang pemegang kekuasaan juridis tertinggi yang mendelegasikan kekuasaannya kepada para qadhi dan perangkat hukum lainnya. Kekuasaan politik juga didelegasikan kepada para penguasa lokal (uleebalang) yang diberikan secara resmi dalam bentuk “sarakata.” Namun, ia juga dibantu oleh petinggi keagamaan, yang bergelar *syaikh al-Islam* (Hadi, 2004). Yang menarik dalam hal ini adalah seorang *syaikh al-Islam* tidak hanya memiliki tugas keagamaan, tetapi juga memiliki peran politik yang besar, seperti deputi sultan, penasihat sultan, bahkan juga guru dari penguasa.

3. Dimensi Perdagangan

Aceh sebagai salah satu kerajaan yang berdiri di Indonesia bukan hanya dikenal sebagai kerajaan Islam yang tetap eksis hingga saat ini. Disamping itu, Aceh juga menjadi pusat perdagangan internasional yang dilintasi oleh berbagai negara kawasan. Di sinilah pertukaran budaya terjadi antara Aceh dengan dunia luar, baik di bidang perekonomian,

agama dan sebagainya. Kepulauan Nusantara dan semenanjung tanah Melayu sepanjang sejarah merupakan wilayah-wilayah yang sangat strategis, oleh karena terletak antara lautan Hindia dan laut Cina selatan yang menghubungkan negeri-negeri sebelah timur, seperti Cina, dan Jepang, dengan negeri-negeri sebelah barat, yaitu anak benua India, Parsi dan negara-negara Arab, Afrika, serta Benua Eropa. Kepulauan Nusantara menghasilkan rempah-rempah dan hasil-hasil bumi lainnya yang amat diminati oleh pedagang-pedagang dari timur dan barat. Di Selat Malaka, misalnya muncullah pelabuhan-pelabuhan transit tempat para pedagang dari segenap penjuru bersama kapalnya bertemu, mengadakan transaksi perdagangan, sambil menunggu giliran datangnya angin musim timur-laut dan barat-daya yang akan membawa mereka bersama barang-barang dagangannya ke tempat tujuan masing-masing. (Alfian, 1999).

Begitu pula ketika Malaka menggantikan kedudukan Samudra Pasai, Bandar internasional Indonesia bagian barat pun menjadi pusat perdagangan lada. Perdagangan yang lebih menguntungkan Aceh baru terjadi pada dasawarsa pertama abad ke-16. Jatuhnya Malaka dan Pasai ke Portugis mengakibatkan banyak pedagang-pedagang Islam meninggalkan Malaka dan mencari pangkalan baru di daerah Aceh. Ketika itulah lada mulai menjadi sumber penghasilan yang banyak digunakan serta menguntungkan di Aceh. Dalam memajukan dunia perdagangan, Aceh berusaha menguasai daerah-daerah penghasil lada di daerah Sumatra, lebih-lebih dalam penguasaan atas selat Malaka sebagai pusat perlintasan perdagangan internasional.

Berakhirnya kekuasaan Portugis menguasai Malaka pada 14 Januari 1641 menjadikan dunia perdagangan Aceh di Pelabuhan Malaka semakin menemukan angin segar. Portugis pergi meninggalkan Malaka selain karena gempuran militer Aceh dan Belanda, yang paling penting juga disebabkan karena gagal menangani bisnis perdagangan di Malaka, dimana aktivitas dagang dimonopoli oleh kelompok pengontrol Malaka. Selain itu juga akibat tindakan korupsi yang dilakukan mereka. Faktor lain yang memperlemah aktivitas perdagangan Portugis di Malaka adalah boikot yang datang dari Jawa sebagai pemasok utama beras ke kota tersebut. Blokade militer dan ekonomi yang ditujukan kepada Portugis membuat mereka kian lemah. Bahkan, saat itu pedagang-pedagang muslim tidak mengunjungi selat Malaka pada saat Malaka ada di tangan Portugis. Mereka beralih ke pelabuhan lain seperti ke Johor, Deli, Perak dan Batam. Sehingga Portugis benar-benar terpuruk sampai akhirnya posisinya tergantikan oleh kerajaan Aceh sendiri di pelabuhan Malaka.

Dalam bidang perdagangan, lada menjadi salah satu bahan yang menjadi perdagangan dunia di Aceh (Kawalirang, 2010). Tanaman ini sudah dikenal di Aceh sejak abad ke-9, terutama di daerah Nampoli, Lamuri, Perlak, dan Samudra. Tanaman ini awal mulanya belum dijadikan sumber perdagangan dan pengembangan negeri, karena saat itu Aceh masih di bawah kekuasaan Pedie. Mulanya lada diekspor melalui Perlak, kemudian pada masa kejayaan Samudra Pasai, Bandar Pasailah yang memperoleh keuntungan dari lada ini.

Tome Pires memperkirakan bahwa Aceh mengeksport lada kira-kira 8.000 sampai 10.000 bahar setiap tahun, atau 15.000 bahar jika terjadi panen yang melimpah. Di samping

mengekspor lada, Aceh juga mengekspor sutra, kapur barus, dan emas dari daerah-daerah pedalaman. Dipercayai bahwa metode memeroses sutra diperkenalkan di Aceh oleh orang-orang Cina (Roelofz, 1962). Giovanni da Empoli memberikan informasi bahwa kerajaan Aceh berjanji akan memberikan sutra kepada orang-orang Portugis untuk diekspor; sebelum itu Aceh memasok sutra kepada pedagang-pedangan Gujarat yang kemudian menukarkan sutra itu dengan berbagai bahan dari Cambay India dan barang-barang dagangan lainnya yang berharga 100.000 ducat (Roelofz, 1962). Hal ini menjadi faktor utama melambungnya kebutuhan dari beberapa komoditas yang dihasilkan dari kerajaan Aceh Darussalam. Hal ini yang menjadikan perekonomian semakin maju. Kas kerajaan Aceh meningkat, pembangunan-pembangunan semakin baik dan lancar serta sektor-sektor lain diselenggarakan dengan lancar.

Hasil Perkembangan Kebudayaan Kerajaan Aceh Darussalam

1. Bentuk Fisik

Selain perkembangan budaya yang ada pada masa kesultanan Aceh secara umum, di lingkungan kerajaan sendiri secara khusus terdapat budaya yang berbentuk fisik. Budaya-budaya tersebut salah satunya seperti bangunan masjid, taman, dan lain sebagainya. Kehidupan dalam istana sebagai salah pusat kebudayaan yang ada di Aceh, karena bentuk-bentuk istana sultan, dan kerangka-kerangka lainnya dapat ditemukan di dalam istana tersebut. Bangunan-bangun yang dan begitu mewah, nisan-nisan atau makam, gedung umum, sipil dan militer, serta gunung (Lombard, 1991). Bangunan-bangunan itu mayoritas berbentuk fasilitas, baik untuk sultan maupun anggota lain seperti pasukan militer.

Selain bangunan yang disebutkan di atas, ada pula taman yang terbentuk membentang di samping bangunan istana dengan dikelilingi tembok batu berwarna putih, tempat kediaman raja, kolam-kolam, beberapa pepohonan, dan lain sebagainya (Lombard, 1991). Selain itu pada masanya juga ada kegiatan upacara atau ritus yang dilakukan untuk menziarahi makam-makam raja atau leluhur (Lombard, 1991). Sedangkan bentuk bangunan-bangunan yang telah disebutkan di atas, secara detail tidak dijelaskan seperti apa model dan bentuk arsitekturnya secara terperinci.

2. Intelektualitas

Di bawah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam terdapat banyak perkembangan kebudayaan yang mendasar salah satunya adanya kebangkitan intelektualitas. Syaikh Muhammad Yamani, dari Yaman, juga datang ke Aceh dengan mengajarkan ilmu ushul al-fiqh. Juga pada masa pemerintahan Sultan ini paman Al-Raniri datang dan berkarir di Aceh. Ia adalah Syaikh Muhammad Jailani ibn Hasan ibn Muhammad, yang mengajar sastra Arab, logika, fiqh, ushul al-fiqh, dan bahkan tasawuf. (Al-Raniri, 1966). Sehingga tidak heran bila di Aceh banyak dikenal tokoh pengarang baik dalam karya sastra, tasawuf dan lain sebagainya. Bentuk penulisan ada yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Melayu. Salah satu hasil karya yang dapat dilihat yaitu *Bustanussalatin* (taman raja-raja),

yang ditulis oleh Nuruddin ar-Raniri. Kitab ini berisi berbagai kehidupan masyarakat seperti bentuk larangan minum-minum keras dan pelanggaran keagamaan lainnya oleh Sultan Iskandar Muda (Al-Raniri, 1966).

Ada kitab lain yaitu Tajus Salatin, dalam bahasa Melayu berarti mahkota raja-raja. Pengarangnya adalah Bukhari al-Jauhari. Kitab ini mengulas diantaranya tentang teori mengenai kekuasaan, memberikan nasihat yang bersifat teoritis dan praktis, baik mengenai politik maupun pemerintahan (Lombard, 1991). Ada pula kitab Hikayat Aceh, kitab ini tidak begitu lengkap mengulas mengenai kehidupan Iskandar Muda, hanya menyajikan silsilah dan kisah masa kecilnya (Lombard, 1991). Selain karya-karya prosa tersebut sebenarnya masih ada hasil karya lain pada masanya dengan berbentuk tutur atau lisan.

KESIMPULAN

Kerajaan Aceh Darussalam merupakan kerajaan yang mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Tidak hanya aspek demografis, melainkan juga aspek kebudayaan. Kebudayaan yang berkembang di kerajaan Aceh Darussalam mempunyai ciri khas tersendiri sebab adanya formulasi antara sistem adat istiadat dan juga sistem keagamaan yang mengalami akulturasi. Dalam budaya keagamaan kerajaan Aceh Darussalam telah mampu menerapkan dan mempraktekkan ajaran keagamaan yang unik dibandingkan dengan wilayah yang lainnya, meskipun secara aliran, masih menganut aliran Sunni, namun sudah mengalami modifikasi dalam praktek-prakteknya.

Hal itu juga terjadi di dalam budaya politik. Aceh Darussalam yang memiliki bentuk pemerintahan kenegaraan kesultanan, dengan kepala Negara disebut sebagai sultan, dan ini merupakan suatu pemerintahan yang memiliki kuasa politis dan kuasa agama. Kedua tugas itu menjadikan seorang sultan memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan secara menyeluruh. Selain kedua budaya tersebut juga terdapat budaya perdagangan. Wilayah yang strategis dan menguntungkan, menjadikan kerajaan Aceh Darussalam menjadi wilayah yang potensial dalam bidang perdagangan, sehingga masyarakat Aceh menjadikan perdagangan sebagai kebiasaan sehari-hari.

Adapun budaya-budaya yang berkembang pada masa itu, antara lain budaya yang berbentuk fisik dan non fisik. Budaya yang berbentuk fisik seperti bangunan istana, taman-taman, kolam, nisan dan sebagainya. Sedangkan yang non fisik yaitu berupa hasil karya pemikiran para tokoh-tokoh saat itu, hasil karyanya seperti kitab Bustanussalatin karangan Nuruddin ar-Raniri, Tajus Salatin karya Bukhari al-Jauhari, Hikayat Aceh, karya-karya lain baik yang bentuk prosa maupun non prosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Aboe Bakar. "Aceh Dalam Lintasan Sejarah". *Makalah dipresentasikan pada Seminar Pekan Kebudayaan Aceh ke II*. Banda Aceh. 1972.
- Ahmad, Zakaria. *Sekitar Kerajaan Aceh dalam tahun 1520-1675*. Medan: Monora. 1972.

HISTORIA ISLAMICA

Journal History And Islamic Civilization

<http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/historia/index>

(P-ISSN xxxxxxxx; E-ISSN: xxxxxxxx)

Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2022

-
- Alfian, Teuku Ibrahim. *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. 1999.
- Al-Raniri, Nur al-Din. *Bustanu's-salatin*. ed. T. Iskandar (ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia. 1966.
- Arnold, Sir Thomas. *The Caliphate*. New York: Barnes & Noble. 1965.
- As-Singkili, Abdurrauf. *Mir'at al-Thullab fi Tashil Ma'rifat al-Ahkâm al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. 1971.
- Azra, Azyumardy. *Ensiklopedi Tasawuf*. Bandung: Angkasa. 2008.
- Burke, Peter. *Teori dan Sejarah Sosial*. Jakarta: Obor. 2003.
- Djajadiningrat, Raden Hoesein. *Kesultanan Aceh*. Terj Teuku Hamid. Aceh: Departemen Pendidikan dan Budaya Proyek Pengembangan Pemusuman. 1982.
- Dorleans, Bernard. *Orang Indonesia dan Orang Prancis dari abad XVI sampai dengan abad XX*. Jakarta: Gramedia. 2006.
- Gazali. "Interelasi Umara dan Ulama dalam Menata Kehidupan Sosio-Keagamaan di Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda 1607-1636". *Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: Belum diterbitkan. 2016.
- Hadi, Amirul. "Menguak Beberapa Dimensi Budaya Kerajaan Aceh; Sebuah Kajian Historis". *Jurnal MIQOT*. Vol. XXXII No. 1 Januari-Juni 2008.
- _____. *Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010.
- _____. *Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth Century Aceh*. Leiden: E. J. Brill. 2004.
- Harun, M. Yahya. *Kerajaan Islam Nusantara Abd XVI & XVII*. Yogyakarta: KurniaKalam Sejahtera. 1995.
- Hasjmy, A. *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Benual. 1983.
- _____. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Jakarta: Almaarif. 1981.
- Kawilarang, Harry. *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing. 2010.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- _____. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Pres. 1990.
- Lewis, Bernard. *The Political Language of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press. 1988.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh; Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Terj, Winarsih Arifin. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Morgan, Lewis Henry. *Ancient Society; Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization*. New Delhi: Indian KP Bagchi. 1982.
- Mukarrom, Ahwan. *Sejarah Islam Indonesia I*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Roelofs, M.A.P. *Meilink Asian Trade and European Influence in The Indonesian Archipelago between 1500 and 1630*. The Hague: Martinus Nijhoff. 1962.

HISTORIA ISLAMICA

Journal History And Islamic Civilization

<http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/historia/index>

(P-ISSN xxxxxxxx; E-ISSN: xxxxxxxx)

Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2022

Said, Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Harian Waspada. 2007.

Suparlan, Dadang. *Manusia Dalam Kontek Sosial Budaya dan. Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Wati, Erni Budi. *Islam Sasak*. Yogyakarta: LKiS. 2000.